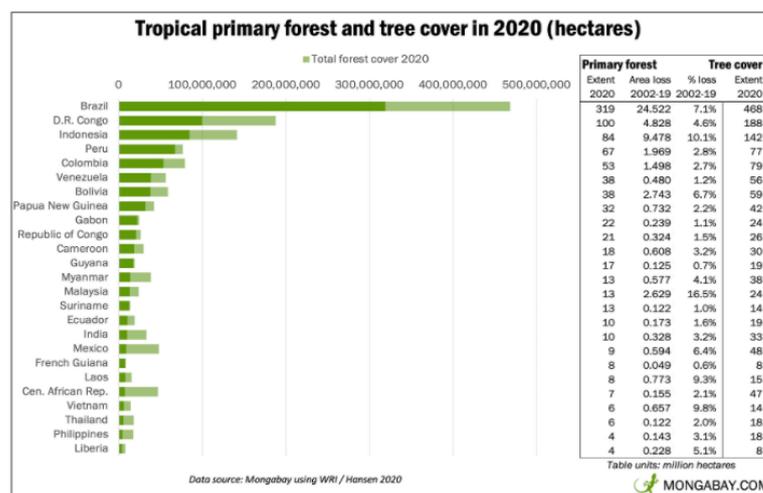


## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keberadaan dari hutan hujan dapat dilihat dari zona khatulistiwa antara garis lintang dengan suhu yang hangat dan sinar matahari sepanjang tahun yang relatif konstan. Hutan hujan memiliki ciri khas hutannya yaitu adanya tingkat curah hujan tinggi, hutan hujan tropis yang luas memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan, juga memiliki kelembapan udara yang tinggi. Hutan hujan tropis pada umumnya terletak diantara 23,5 derajat Lintang Utara sampai 23,5 derajat Lintang Selatan pada garis khatulistiwa (Indonesia.go.id, 2018). Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan hujan yang cukup luas yang menjadikannya sebagai negara *mega biodiversity* atau disebut juga sebagai negara dengan keanekaragaman hayati. Menurut data Mongabay, Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara dengan hutan hujan tropis terluas di dunia, yang juga mencakup hutan tropis dan sumbangan dari hutan hujan Kalimantan dan Papua (Mongabay Indonesia, 2020).



Gambar 1. Jumlah Hutan Primer di dunia tahun 2020

Hutan hujan tropis yang dimiliki oleh Indonesia merupakan rumah atau tempat tinggal bagi ribuan makhluk hidup. Sebanyak sekitar 17% keseluruhan makhluk hidup di dunia memiliki kehidupan di hutan Indonesia (A.T.Jadda, 2019).

**Cathrine Anggia Riani, 2022**

**PERAN CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES) DALAM Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs Tujuan 15 Point 7) di Indonesia Periode 2015-2017**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional  
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Kelimpahan aneka ragam hayati yang terdapat di Indonesia memberikan dukungan terhadap pendapatan negara dengan jumlah yang cukup besar (Rhiti, 2005). Pada tahun 2014 tercatat sebanyak 1666 spesies burung dengan 3000 sub spesies yang terdapat di Indonesia dengan jumlah jenis burung yang ada di dunia sekitar 10.425 jenis burung (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2015). Hal tersebut menjadi fakta pendukung dari kekayaan alam Indonesia yang juga diikuti dengan keragaman spesies flora. Sebanyak 15,5% dari total jumlah flora yang ada didunia terdapat di Indonesia (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2015). Di Indonesia tercatat, 40.000 jenis tumbuhan berbiji, 1500 jenis algae, 80.000 jenis jamur, 595 jenis lumut, dan 2.197 jenis paku-pakuan (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2015). Dengan beragam tumbuh-tumbuhan yang ada menyebabkan kelangsungan ekosistem darat berjalan dengan baik yang didukung oleh keragaman fauna sebagai salah satu bentuk keanekaragaman hayati. Terdapat 8157 jenis *vertebrata* atau disebut juga dengan hewan bertulang belakang serta terdapat 10 persen jenis kupu-kupu dari total jenis kupu—kupu di dunia yaitu sebanyak 1900 jenis kupu-kupu yang ada di Indonesia (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2015).

Seiring berjalannya waktu, tingkat kepunahan *flora* dan *fauna* yang semakin meningkat menjadi awal dari kekhawatiran yang diakibatkan oleh beberapa faktor salah satunya perdagangan ilegal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut International Enforcement Agency (IEA) perdagangan ilegal satwa liar dinilai setara dengan nilai dari perdagangan narkoba, perdagangan manusia, serta perdagangan senjata gelap (WWF Indonesia, 2018). Perdagangan ilegal selain menyebabkan kerusakan ekosistem yang ada, juga menyebabkan kerugian bagi negara. Kejahatan terhadap hewan dan tumbuhan merupakan tindakan dari adanya perdagangan ilegal satwa liar atau sering disingkat PISL. Perdagangan ilegal satwa liar yang terjadi mencakup proses perburuan, pengangkutan, penyiksaan/pembunuhan, pengiriman, pemindahtanganan, penampungan, hingga penerimaan satwa untuk tujuan eksploitasi ( Guntur & Slamet, 2019). Maraknya kejahatan yang terjadi menjadi bukti nyata dari keegoisan manusia dalam menggerus habis kekayaan hayati yang ada. Robert Garner menjelaskan perlunya melakukan upaya perlindungan satwa liar dari ancaman kepunahan yaitu sebab

**Cathrine Anggia Riani, 2022**

**PERAN CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES) DALAM Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs Tujuan 15 Point 7) di Indonesia Periode 2015-2017**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional  
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

terdapat nilai hakiki yang dimiliki oleh hewan sebagai makhluk hidup, adanya nilai yang terkandung dimiliki oleh tiap spesies untuk memiliki peranan dalam keseimbangan ekosistem selain itu adanya nilai ekonomis yang terkandung dalam konteks sebagai objek pariwisata dan sumber dari keuntungan ekonomi, seperti yang digunakan untuk kepentingan kesehatan (Garner, 2000).

Adanya fenomena kepunahan keanekaragaman hayati menyebabkan adanya ketidakseimbangan rantai makanan serta ekosistem alam dimana mampu memberikan dampak beruntun terhadap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung, selain itu kepunahan keanekaragaman hayati seperti hewan dan tumbuhan memastikan generasi yang akan datang tidak memiliki kesempatan untuk mengenal dan mempelajari secara langsung hewan serta tumbuhan terkait dengan kepunahan, dan dampak yang terakhir yaitu peningkatan kepunahan keanekaragaman hayati berjalan lurus dengan perburuan liar serta kerusakan lingkungan, dimana dengan adanya fenomena kepunahan keanekaragaman hayati menjadi tanda bahwa semakin bertambah banyaknya perburuan liar dan kerusakan alam yang terjadi juga semakin buruk. Fenomena kepunahan keanekaragaman hayati akibat tindak kejahatan perdagangan ilegal dapat terjadi akibat adanya beberapa faktor tertentu (Guntur & Slamet, 2019) yang pertama yaitu faktor ekonomi dimana pada umumnya *flora* dan *fauna* memiliki nilai ekonomis tersendiri yang menjadi penyebab dari faktor pendorong terjadinya kejahatan keanekaragaman hayati. Nilai ekonomis yang terkandung dalam setiap spesies *flora* dan *fauna* berbanding terbalik dengan jumlah keseluruhan spesies, semakin sedikit populasi dari spesies tertentu maka nilai ekonomisnya pun menjadi semakin tinggi. Menurut data perhitungan dari Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terjadinya kejahatan terhadap keanekaragaman hayati yang berupa perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia mencapai Rp 9 Triliun pertahun. Faktor yang kedua yaitu faktor kebudayaan, adanya kebudayaan Indonesia yang kental dengan pemanfaatan alam baik memanfaatkan lahan serta sumber daya alam yang ada, juga memanfaatkan *flora* dan *fauna* khususnya untuk dikonsumsi sebagai bagian dari adat ataupun dipercaya untuk menjadi ramuan penyembuh beberapa penyakit. Hal tersebut memberikan

Cathrine Anggia Riani, 2022

*PERAN CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES) DALAM Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs Tujuan 15 Point 7) di Indonesia Periode 2015-2017*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional  
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

dampak terhadap kehidupan hewan serta tumbuhan yang dianggap wajar untuk dieksploitasi demi kelangsungan hidup manusia.

Rantai Perdagangan Satwa Liar Dilindungi diawali dari peranan pemburu sebagai pelaku kejahatan perdagangan ilegal (Berita dari Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, 2015). Para pemburu yang melakukan aktivitas ilegal dengan menangkap satwa liar yang sudah dipesan oleh para peminatnya atau disebut dengan konsumen, hal tersebut dapat terjadi akibat dari adanya faktor ekonomi yang dapat diperoleh dan melatarbelakangi aktivitas ilegal tersebut dilanjutkan dengan adanya peran pemodal sebagai penyeleggara kegiatan perburuan satwa liar dilindungi, pemodal merupakan peran yang membuka terjadinya perburuan dan perdagangan di pasar gelap. Selain itu pemodal kerap kali menjadi tokoh yang mengakomodir hasil perburuan serta menjaga atau melindungi para pemburu dari petugas. Dilanjutkan dengan kehadiran makelar yang mempertemukan pemburu serta konsumen dengan harapan mendapatkan biaya dari kedua belah pihak yaitu pemburu dan konsumen, setelah makelar dilanjutkan dengan kehadiran kurir sebagai pemberi jasa dalam mengantarkan satwa kepada pemilik baru dari satwa yang bersangkutan. Selain itu terdapat pula peranan dari penunjuk jalan atau disebut dengan *volunteer* dimana pemberi jasa mampu memberikan informasi terkat wilayah perburuan sehingga perburuan yang dilakukan bersifat efisien dan efektif dalam penggunaan waktunya, hal tersebut dapat terjadi akibat dari pengalaman pemberi jasa dalam menjelajah wilayah perburuan. Rantai terakhir dari perdagangan satwa liar yang dilindungi yaitu adanya peranan seorang penjaga atau disebut dengan *backing* dalam mengurus negosiasi ataupun ancaman yang muncul akibat dari tertangkapnya seorang pemburu, pada umumnya *backing* adalah seorang aparat dengan pengaruh kekuasaan dan wewenang dibidang hukum tindak pidana kehutanan.

Dalam menjaga kelangsungan hidup *flora* dan *fauna* yang ada, sangat penting dilakukannya konservasi sebagai upaya mempertahankan kehidupan hayati yang ada di Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya ketimpangan dalam ekosistem yang ada. *Flora* dan *fauna* memiliki peranan dalam

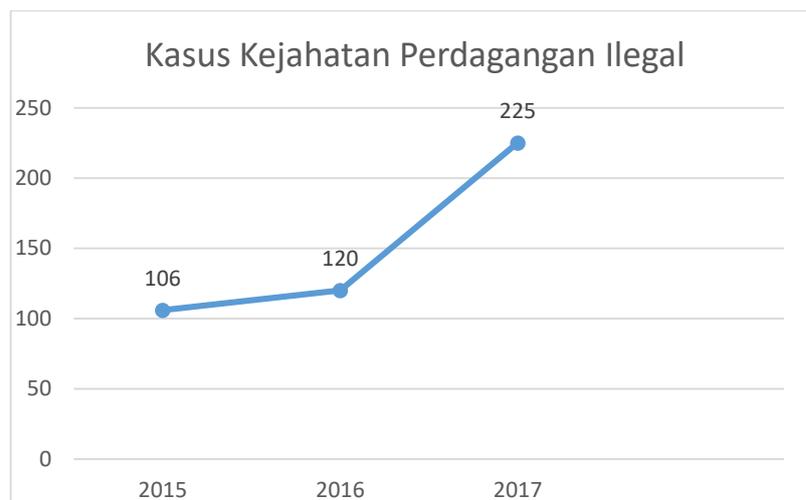
Cathrine Anggia Riani, 2022

*PERAN CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES) DALAM Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs Tujuan 15 Point 7) di Indonesia Periode 2015-2017*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

menyeimbangkan ekosistem daratan yang juga berdampak terhadap kelangsungan hidup manusia. Dunia internasional melihat bahwa pentingnya menjaga keseimbangan keanekaragaman hayati yang ada dan melihat urgensi yang terjadi maka dunia internasional memiliki agenda dalam membentuk strategi konservasi sedunia yaitu (MacKinnon, 1990), menjaga proses serta sistem penopang kehidupan yang penting bagi kelangsungan hidup manusia dan pembangunan, melestarikan keanekaragaman plasma nutfah yang penting bagi program budi daya agar dapat melindungi dan memperbaiki sifat-sifat tanaman dan hewan budidaya. Selain itu hal ini penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi dan terjaminnya sejumlah industri besar yang menggunakan sumber daya alam, dan yang terakhir yaitu menjamin kesinambungan pendayagunaan jenis dan ekosistem oleh manusia.

Gambar 2. Kasus Kejahatan Perdagangan Ilegal



Sumber: Indonesian Center for Environmental Law <https://icel.or.id/berita/icel-dalam-berita/capokja-konservasi-kejahatan-satwa-liar-dilindungi-2015-2018-naik/>

Adanya peningkatan terhadap jumlah kasus kejahatan perdagangan ilegal pada tahun 2015-2017 yang terjadi di Indonesia menjadi bukti nyata dari penerapan yang kurang maksimal konvensi internasional dalam menyelesaikan permasalahan. Sejalan dengan SDGS Tujuan 15 yang berfokus pada melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta

Cathrine Anggia Riani, 2022

*PERAN CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES) DALAM Mendukung Sustainable Development Goals (SDGS Tujuan 15 Point 7) di Indonesia Periode 2015-2017*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati peranan CITES terhadap SDGS Tujuan 15 dapat menjadi dasar dalam upaya perlindungan keanekaragaman hayati. Perlindungan keanekaragaman hayati menjadi fokus dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang diprogramkan oleh PBB menjadi sebuah bukti bahwa kehadiran CITES tidak menjadi jaminan untuk keberlangsungan hidup flora dan fauna yang hampir punah.. Kejahatan perdagangan ilegal satwa dilindungi masuk kedalam kejahatan transnasional menurut United Nation Office, sebab kejahatan yang dilakukan memiliki sifat terorganisir serta memberikan kerugian yang sangat besar (Persatuan Jaksa Indonesia, 2019). Dilihat dari penjelasan diatas bahwa pada kenyataannya masih banyak terjadinya kasus perdagangan satwa liar dilindungi yang memberikan kerugian sangat besar bagi negara dan hal ini sudah menjadi urgensi yang harus diatasi. Banyaknya kasus kejahatan perdagangan hewan ilegal yang terjadi menjadi salah satu latar belakang dari munculnya SDGS tujuan 15 khususnya pada poin 7 untuk memerangi perburuan dan penjualan spesies dilindungi. Dengan banyaknya dukungan global, diharapkan dapat mengurangi kejahatan perdagangan hewan ilegal yang terjadi. Sehingga penelitian ini akan lebih dalam melihat peranan CITES di Indonesia dalam mendukung SDGS tujuan 15 poin 7 yang menjadi salah satu tujuan dari PBB.

Dalam pelaksanaan SDGS Tujuan 15 Poin 7, terdapat tujuh indikator berdasar pada laporan indikator dan pemetaan data dalam mengukus SDGS yang dirilis oleh United Nations Development Programme – Indonesia pada tahun 2015. Terdapat tujuh indikator dalam pelaksanaan SDGS Tujuan 15 Poin 7 (United Nations Development Programme-Indonesia, 2015) yaitu yang pertama data *Red List Index* yang dikeluarkan oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN) dimana *red list* merupakan sebuah data yang mengklasifikasi spesies hewan dan tumbuhan yang beresiko tinggi mengalami kepunahan. Hal ini untuk mempermudah mengetahui perkembangan kepunahan spesies tertentu. Pengklasifikasian dibagi menjadi sembilan kategori yaitu spesies yang tidak dievaluasi, data kurang, sedikit perhatian, hampir terancam, rentan, terancam punah, sangat terancam Punah, punah di alam liar dan punah. Data *Red List* menjadi indikator pertama dalam pelaksanaan SDGS Tujuan 15 Poin 7. Indikator yang

**Cathrine Anggia Riani, 2022**

**PERAN CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES) DALAM MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS TUJUAN 15 POIN 7) DI INDONESIA PERIODE 2015-2017**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional  
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

kedua yaitu jumlah terferivikasinya unit penangkaran yang akan melakukan peredaran Luar Negeri, indikator yang ketiga yaitu jumlah penanganan terkait perkara tindak pidana kehutanan yang ditargetkan minimal 75 kasus yang diselesaikan dalam waktu satu tahun, indikator keempat yaitu dilihat dari jumlah pengamanan dan penindakan lokasi yang terindikasi gangguan dan ancaman bidang kehutanan dengan target 70 lokasi yang terlaksana pada UPTPHKA, indikator kelima yaitu standar minimum sarana serta prasarana terkait pengamanan hutan yang terlaksana di 226 lokasi pada UPTPHKA dan Brigade SPORC, indikator selanjutnya yaitu dilihat dari jumlah peningkatan kapasitas sumber daya manusia dibidang pengamanan hutan dengan target 10.000 orang, indikator ketujuh yaitu dilihat berdasar pada rasio indeks dari total CITES *wildlife* untuk izin ekspor. Ketujuh indikator dari tujuan pembangunan berkelanjutan ini diharapkan mampu mengukur adanya pembangunan yang berpotensi pada kelestarian keanekaragaman hayati. Dapat dilihat bahwa CITES menjadi salah satu indikator keberhasilan SDGS dimana dalam pelaksanaan SDGS, CITES mengambil peranan mengingat bahwa adanya kesamaan tujuan dalam memerangi kepunahan keanekaragaman hayati yang diakibatkan oleh kejahatan perdagangan satwa liar dilindungi.

## 1.2 Rumusan Masalah

Maraknya terjadi kejahatan perdagangan ilegal menjadi titik awal dari kurangnya penerapan ekologi yang mendasari pentingnya timbal balik terhadap alam. Munculnya CITES sebagai konvensi internasional sebagai salah satu bentuk adanya keinginan untuk menciptakan ekologi yang seimbang. Sejalan dengan program keberlanjutan yang dicanangkan PBB, SDGS hadir sebagai bentuk aksi dari perwujudan harapan masyarakat internasional dalam memerangi tindakan kejahatan perdagangan ilegal yang sangat merugikan bagi kehidupan bernegara. Mengacu pada penjelasan diatas, peneliti merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

### ***Bagaimana Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) berperan dalam mendukung Sustainable***

Cathrine Anggia Riani, 2022

***PERAN CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES) DALAM Mendukung Sustainable Development Goals (SDGS TUJUAN 15 POIN 7) DI INDONESIA PERIODE 2015-2017***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

## ***Development Goals (SDGS tujuan 15 poin 7) di Indonesia periode tahun 2015-2017?***

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan peranan CITES sebagai sebuah konvensi internasional yang berfokus pada perdagangan hewan dan tumbuhan yang dilindungi sebagai bentuk dukungan pencapaian SDGS tujuan 15 yang berfokus pada poin 7 di Indonesia. Memahami lebih dalam mengenai perdagangan hewan dilindungi di Indonesia yang dilihat dari peran CITES serta melihat SDGS tujuan 15 poin 7 sebagai sebuah harapan dalam memerangi kejahatan perdagangan hewan ilegal.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat akademis:

- a) Peneliti dapat memahami dengan baik mengenai peranan CITES sebagai sebuah rezim internasional dalam mendukung tujuan SDGS dibidang ekosistem daratn khususnya dalam mengatasi perdagangan ilegal keanekaragaman hayati.
- b) Peneliti dapat menambah pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan peneliti khususnya pada isu-isu internasional terkait dengan topik yang peneliti ambil.

2. Manfaat praktis:

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat terhadap para pembaca serta menjadi referensi akademis lainnya.

**Cathrine Anggia Riani, 2022**

***PERAN CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES) DALAM Mendukung Sustainable Development Goals (SDGS TUJUAN 15 POIN 7) DI INDONESIA PERIODE 2015-2017***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

## 1.5 Sistematika Penelitian

### BAB I : Pendahuluan

Pada bagian pertama, pendahuluan menjadi titik awal dari urgensi yang diangkat pada penelitian ini. Pada bagian pendahuluan dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

### BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab kedua ini banyak menjelaskan mengenai pembahasan dari literatur-literatur yang memiliki korelasi dengan topik penelitian. Tujuan dari penulisan tinjauan pustaka ini adalah untuk dapat mengidentifikasi literatur terkait dengan topik permasalahan yang diteliti sehingga dapat diidentifikasi perbedaan penelitian ini dengan literatur-literatur terdahulu. Bab ini berisi penjelasan mengenai kerangka teori, alur pemikiran, dan asumsi terkait dengan hasil penelitian.

### BAB III : Metodologi Penelitian

Pada bab ini, banyak terdapat penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam merumuskan penelitian yang didalamnya mengandung penjelasan mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis data, serta teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

### BAB IV : Keadaan Umum Tumbuhan dan Hewan di Indonesia

Dalam bab ini, membahas mengenai keadaan umum ataupun membahas fakta-fakta yang terjadi terkait dengan kondisi satwa liar dilindungi di Indonesia.

### BAB V : Convention on International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna Dalam Mencapai Tujuan Sustainable Development Goals Di Indonesia

**Cathrine Anggia Riani, 2022**

***PERAN CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES) DALAM MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS TUJUAN 15 POIN 7) DI INDONESIA PERIODE 2015-2017***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Pada bab ini, peneliti menganalisis keterkaitan antara peran yang telah dilakukan CITES dalam pencapaian tujuan SDGS di Indonesia

## BAB VI : Kesimpulan

Bab penutup dimana berisi mengenai analisis terkait CITES terhadap kejahatan perdagangan satwa liar dilindungi di Indonesia yang disajikan dalam bentuk kesimpulan keseluruhan penelitian.

**Cathrine Anggia Riani, 2022**

***PERAN CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES) DALAM Mendukung Sustainable Development Goals (SDGS TUJUAN 15 POIN 7) DI INDONESIA PERIODE 2015-2017***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]